VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SIGI

Hendrik Hermawan[1)], Ani Susanti[2)], Meldi Amijaya[3)]

[1] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
hendrikhermaaan2002@gmail.com
[2] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
anisaqramullah@gmail.com
[3] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
meldiamijaya89@gmail.com

ABSTRAK

Penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan yang membutuhkan kepemimpinan efektif, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki karakteristik wilayah yang menghadapi berbagai potensi ancaman bencana, baik bencana geologi, hidrometeorologi, maupun bencana lainnya. Kondisi tersebut menuntut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Artikel ini bertujuan menganalisis gaya kepemimpinan Kepala BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen. Kerangka analisis mengacu pada konsep kepemimpinan transformasional, situasional, dan partisipatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan struktural, tetapi harus didukung kemampuan membangun koordinasi, menggerakkan sumber daya manusia, mengambil keputusan dalam situasi darurat, serta menjalin komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Gaya kepemimpinan transformasional, situasional, dan partisipatif dapat menjadi pendekatan yang saling melengkapi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian, efektivitas kepemimpinan Kepala BPBD perlu diarahkan pada penguatan kapasitas organisasi, kolaborasi antarlembaga, kesiapsiagaan masyarakat, dan keberlanjutan program pengurangan risiko bencana.

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Penanggulangan Bencana, Koordinasi

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

Disaster management is a government affair that requires effective leadership, cross-sector coordination, and the ability to make quick and accurate decisions. Sigi Regency, Central Sulawesi Province, is characterized by a region facing various potential disaster threats, including geological, hydrometeorological, and other disasters. This condition requires the Regional Disaster Management Agency (BPBD) to have institutional capacity and leadership capable of integrating prevention, preparedness, emergency response, and post-disaster recovery activities. This article aims to analyze the leadership style of the Head of BPBD in implementing disaster management in Sigi Regency and identify factors that influence the effectiveness of such leadership. The study uses a qualitative descriptive approach with literature study and document analysis methods. The analytical framework refers to the concepts of transformational, situational, and participatory leadership. The results of the study indicate that leadership in disaster management organizations is not sufficient to rely solely on structural authority, but must be supported by the ability to build coordination, mobilize human resources, make decisions in emergency situations, and establish communication with the community and stakeholders. Transformational, situational, and participatory leadership styles can be complementary approaches to improving the effectiveness of disaster management. Therefore, the leadership effectiveness of the Head of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) needs to be directed at strengthening organizational capacity, inter-agency collaboration, community preparedness, and the sustainability of disaster risk reduction programs.

Keywords: Leadership Style, Disaster Management, Coordination

Submisi: 05-10-2026
Diterima: 06-10-2026
Dipublikasikan: 11-11-2026

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat, menimbulkan kerugian material, merusak lingkungan, serta mengancam keselamatan manusia. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, bencana tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan alam, tetapi juga sebagai persoalan administrasi publik yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan secara terpadu. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola risiko bencana menjadi salah satu indikator penting dari kualitas pelayanan publik dan kapasitas tata kelola pemerintahan.

Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kondisi geografis dan karakteristik lingkungan dengan potensi ancaman bencana. Pengalaman bencana gempa bumi, likuefaksi, banjir, tanah longsor, serta ancaman bencana hidrometeorologi menunjukkan bahwa persoalan kebencanaan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Kerentanan wilayah tersebut semakin memperlihatkan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi juga pada tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum bencana berlangsung.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki posisi strategis sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Ketiga tahapan tersebut membutuhkan keterpaduan kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pihak.

Keberhasilan BPBD dalam menjalankan tugasnya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, maupun jumlah personel. Faktor kepemimpinan juga memiliki pengaruh penting terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Kepala BPBD bukan sekadar pejabat yang menjalankan fungsi administratif, melainkan pemimpin organisasi yang harus mampu mengarahkan personel, membangun kerja sama, menyelesaikan permasalahan, serta mengambil keputusan dalam kondisi yang sering kali tidak dapat diprediksi.

Dalam situasi normal, pemimpin BPBD dituntut mampu membangun sistem kerja yang terencana dan memastikan program pengurangan risiko bencana berjalan secara berkelanjutan. Sementara itu, dalam keadaan darurat, pemimpin harus mampu menentukan prioritas tindakan, menggerakkan personel, mengoordinasikan bantuan, serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh pelayanan dan perlindungan secara cepat. Perbedaan karakteristik situasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi kebencanaan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi yang aktivitasnya berlangsung dalam kondisi relatif stabil.

Permasalahan kepemimpinan dalam penanggulangan bencana juga berkaitan dengan koordinasi lintas sektor. Penanganan bencana tidak mungkin dilaksanakan BPBD secara mandiri. Terdapat keterlibatan perangkat daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, organisasi kemasyarakatan, relawan, dunia usaha, serta

masyarakat. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, pelaksanaan penanggulangan bencana berpotensi menghadapi persoalan tumpang tindih kewenangan, keterlambatan informasi, ketidaktepatan distribusi bantuan, dan kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya.

Dari sudut pandang administrasi publik, persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi juga menyangkut kemampuan membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan berbagai aktor agar bekerja berdasarkan tujuan bersama.

Gaya kepemimpinan transformasional menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena menekankan kemampuan pemimpin dalam membangun visi, memberikan motivasi, mendorong inovasi, dan meningkatkan komitmen organisasi. Di sisi lain, kepemimpinan situasional dibutuhkan karena penanganan bencana memerlukan penyesuaian pola pengarahan berdasarkan kondisi, tingkat kedaruratan, serta kemampuan personel. Sementara itu, kepemimpinan partisipatif diperlukan untuk membuka ruang keterlibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penanggulangan bencana.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai gaya kepemimpinan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi menjadi penting untuk dilakukan. Fokus kajian ini diarahkan pada bagaimana kepemimpinan dijalankan dalam mengarahkan organisasi, membangun koordinasi, mengambil keputusan, menggerakkan sumber daya, serta mendorong partisipasi masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan administrasi publik, khususnya mengenai kepemimpinan organisasi pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan kebencanaan.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menguraikan fenomena kepemimpinan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penelaahan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD.

Sumber data dalam kajian ini terdiri atas bahan sekunder yang meliputi buku-buku administrasi publik, literatur kepemimpinan, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi. Literatur yang digunakan difokuskan pada teori kepemimpinan transformasional, kepemimpinan situasional, kepemimpinan partisipatif, serta konsep manajemen bencana.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, serta dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan berbagai sumber yang relevan dengan fokus pembahasan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan untuk menghubungkan konsep kepemimpinan dengan kebutuhan organisasi BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Adapun fokus analisis meliputi empat aspek, yaitu: (1) kemampuan pemimpin dalam memberikan arahan dan motivasi kepada personel; (2) kemampuan mengambil keputusan dalam situasi normal maupun darurat; (3) kemampuan membangun koordinasi dan kolaborasi lintas sektor; serta (4) kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Perlu ditegaskan bahwa artikel ini merupakan kajian konseptual berbasis literatur dan dokumen, sehingga uraian mengenai kondisi kepemimpinan BPBD Kabupaten Sigi merupakan analisis terhadap kebutuhan dan karakteristik organisasi kebencanaan, bukan hasil wawancara atau observasi lapangan yang telah diverifikasi. kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sigi

Penanggulangan bencana merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kabupaten Sigi memiliki tantangan kebencanaan yang berkaitan dengan kondisi geografis, karakteristik wilayah, serta potensi ancaman alam. Keadaan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada pengurangan risiko.

Dalam perspektif manajemen bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahapan utama. Pertama, tahap prabencana, yang meliputi pencegahan, mitigasi, perencanaan, edukasi, dan kesiapsiagaan. Kedua, tahap tanggap darurat, yang berhubungan dengan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan penanganan masyarakat terdampak. Ketiga, tahap pascabencana, yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ketiga tahapan tersebut memiliki kebutuhan pengelolaan yang berbeda. Pada tahap prabencana, organisasi dituntut memiliki kemampuan perencanaan dan membangun kesadaran masyarakat. Pada tahap tanggap darurat, diperlukan kecepatan koordinasi dan ketegasan pengambilan keputusan. Adapun pada tahap pascabencana, diperlukan kemampuan mengoordinasikan pemulihan serta memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, karakteristik penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi menempatkan BPBD sebagai organisasi yang harus mampu bekerja dalam berbagai situasi. Kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dalam mengarahkan organisasi dan memastikan setiap unsur yang terlibat dapat menjalankan perannya secara terintegrasi.

2. Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala BPBD

Kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin dalam memberikan inspirasi, membangun visi bersama, meningkatkan motivasi, dan mendorong perubahan positif dalam organisasi. Bass dan Riggio (2006) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki empat dimensi utama, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual.

Dalam konteks BPBD Kabupaten Sigi, kepemimpinan transformasional dapat diterapkan melalui kemampuan Kepala BPBD membangun kesadaran bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Pemimpin tidak cukup hanya memberikan instruksi kepada personel, tetapi juga harus mampu menanamkan pemahaman mengenai pentingnya tugas kemanusiaan yang dijalankan organisasi.

Dimensi pengaruh ideal tercermin dari keteladanan pemimpin dalam menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana. Keteladanan tersebut dapat membangun kepercayaan personel terhadap pimpinan sekaligus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya, motivasi inspirasional berkaitan dengan kemampuan pemimpin membangun semangat kerja dan memberikan arah yang jelas kepada personel. Dalam organisasi kebencanaan, pekerjaan sering kali berlangsung dalam kondisi yang melelahkan, penuh tekanan, dan membutuhkan kesiapan setiap saat. Oleh sebab itu, pemimpin harus mampu menjaga semangat kerja serta menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan penanggulangan bencana memiliki dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.

Dimensi stimulasi intelektual dapat diterapkan dengan mendorong personel untuk mengembangkan kemampuan, memanfaatkan teknologi informasi, serta mencari solusi terhadap permasalahan kebencanaan. Misalnya, pengembangan sistem informasi risiko bencana, pemetaan daerah rawan bencana, penggunaan data kejadian bencana, dan pengembangan sistem komunikasi darurat.

Sementara itu, perhatian individual dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap kebutuhan, kompetensi, dan pengembangan kemampuan masing-masing personel. Pemimpin perlu memahami bahwa setiap anggota organisasi mempunyai kemampuan dan pengalaman yang berbeda sehingga pembinaan dan peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif tersebut, kepemimpinan transformasional relevan untuk memperkuat budaya organisasi BPBD yang berorientasi pada pelayanan kemanusiaan, profesionalisme, dan inovasi. Namun, penerapannya perlu didukung oleh kebijakan organisasi, peningkatan kompetensi, serta ketersediaan sumber daya yang memadai.

3. Gaya Kepemimpinan Situasional dalam Menghadapi Kondisi Darurat

Kepemimpinan situasional merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya kemampuan pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kondisi organisasi, karakteristik bawahan, dan situasi yang dihadapi. Hersey, Blanchard, dan Johnson (2013)

menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan berkaitan dengan kesesuaian antara perilaku pemimpin dan tingkat kesiapan individu atau kelompok yang dipimpinnya.

Pendekatan ini memiliki relevansi kuat bagi organisasi penanggulangan bencana karena situasi yang dihadapi dapat berubah dengan cepat. Dalam keadaan normal, Kepala BPBD dapat menerapkan pola kepemimpinan yang lebih konsultatif dan partisipatif, terutama dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan pelatihan, dan pengembangan kapasitas personel.

Akan tetapi, ketika terjadi keadaan darurat, pemimpin perlu menerapkan pola pengarahan yang lebih tegas dan terstruktur. Keputusan mengenai pengerahan personel, koordinasi evakuasi, penyediaan kebutuhan dasar, dan penentuan prioritas penanganan harus dilakukan secara cepat berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut bukan berarti pemimpin harus selalu bersifat otoriter. Ketegasan dalam keadaan darurat tetap harus disertai pertimbangan profesional, kepatuhan terhadap prosedur operasional standar, serta koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, kepemimpinan situasional memungkinkan organisasi bekerja secara fleksibel tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

Dalam konteks Kabupaten Sigi, kemampuan menyesuaikan gaya kepemimpinan menjadi penting karena karakteristik ancaman bencana dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Penanganan banjir, tanah longsor, gempa bumi, maupun kondisi kedaruratan lainnya membutuhkan strategi operasional yang tidak selalu sama.

Oleh karena itu, Kepala BPBD perlu memastikan bahwa setiap personel memahami tugas dan tanggung jawabnya, memiliki kemampuan teknis yang sesuai, serta mampu bekerja dalam sistem komando penanganan darurat. Kesiapan organisasi tidak hanya diukur dari kemampuan pemimpin memberikan instruksi, tetapi juga dari kemampuan seluruh unsur melaksanakan keputusan secara terkoordinasi.

4. Gaya Kepemimpinan Partisipatif dan Kolaborasi Lintas Sektor

Penanggulangan bencana merupakan urusan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh BPBD karena penanganan bencana berkaitan dengan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, infrastruktur, sosial, pendidikan, keamanan, hingga pemerintahan desa.

Kepemimpinan partisipatif memberikan ruang bagi anggota organisasi dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Pendekatan ini penting karena informasi mengenai risiko bencana tidak hanya dimiliki pemerintah, tetapi juga masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah rawan bencana.

Kepala BPBD perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, relawan, dan kelompok masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar penanggulangan bencana tidak berjalan secara sektoral.

Salah satu bentuk penerapan kepemimpinan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam kegiatan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pemetaan risiko, pembentukan kelompok siaga bencana, serta penyusunan rencana kontingensi. Masyarakat

perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana, bukan hanya sebagai penerima bantuan ketika bencana terjadi.

Dalam konteks ini, pemimpin BPBD juga perlu membangun hubungan yang terbuka dengan organisasi nonpemerintah dan sektor swasta. Keterlibatan berbagai pihak dapat memperluas dukungan sumber daya, mempercepat penyampaian informasi, dan meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Pendekatan partisipatif juga berhubungan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informasi mengenai risiko bencana, mekanisme bantuan, dan perkembangan penanganan perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Dengan komunikasi yang baik, potensi kesalahpahaman dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalkan. Dengan demikian, kepemimpinan partisipatif bukan sekadar mengundang pihak lain untuk menghadiri rapat koordinasi, melainkan membangun hubungan kerja yang memungkinkan setiap pihak memberikan kontribusi nyata sesuai kapasitas dan kewenangannya.

5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Kepemimpinan Kepala BPBD

Efektivitas kepemimpinan dalam penanggulangan bencana dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kepemimpinan yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta sistem koordinasi yang memadai.

Pertama, kapasitas sumber daya manusia. Personel BPBD harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana. Pelatihan teknis, simulasi, pendidikan kebencanaan, dan peningkatan kompetensi perlu menjadi perhatian organisasi. Kepala BPBD memiliki tanggung jawab untuk mendorong pengembangan kapasitas tersebut agar setiap personel mampu menjalankan tugas secara profesional.

Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Penanganan bencana memerlukan peralatan evakuasi, kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan, logistik, serta dukungan teknologi informasi. Keterbatasan sarana dapat menghambat pelaksanaan keputusan pimpinan, sekalipun keputusan tersebut telah disusun dengan tepat.

Ketiga, koordinasi antarorganisasi. Perbedaan tugas, kewenangan, dan kepentingan antarlembaga dapat menjadi tantangan dalam penanganan bencana. Oleh karena itu, Kepala BPBD perlu membangun mekanisme koordinasi yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta sistem komunikasi yang efektif.

Keempat, dukungan kebijakan dan anggaran. Program penanggulangan bencana memerlukan perencanaan anggaran yang memperhatikan kebutuhan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Pemimpin harus mampu menyelaraskan prioritas program dengan kebijakan pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, partisipasi masyarakat. Keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kesiapan masyarakat. Masyarakat yang memahami risiko dan mengetahui tindakan penyelamatan dapat mengurangi dampak bencana. Oleh

karena itu, kepemimpinan BPBD harus mampu mendorong tumbuhnya budaya sadar bencana melalui pendidikan, sosialisasi, dan pelibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Berbagai faktor tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak dapat dinilai hanya dari karakter pribadi seorang kepala organisasi. Penilaian juga harus memperhatikan kemampuan membangun sistem kerja, mengelola sumber daya, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

6. Penguatan Model Kepemimpinan BPBD dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sigi

Berdasarkan uraian mengenai kepemimpinan transformasional, situasional, dan partisipatif, dapat dipahami bahwa tidak terdapat satu gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan secara mutlak dalam seluruh situasi kebencanaan. Organisasi BPBD membutuhkan pola kepemimpinan yang adaptif dan mampu menggabungkan keunggulan dari beberapa pendekatan tersebut.

Kepemimpinan transformasional diperlukan untuk membangun visi organisasi, meningkatkan motivasi personel, dan mendorong inovasi. Kepemimpinan situasional dibutuhkan untuk menyesuaikan tindakan berdasarkan tingkat kedaruratan dan kemampuan personel. Sementara itu, kepemimpinan partisipatif diperlukan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Penguatan model kepemimpinan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis.

Pertama, memperkuat perencanaan berbasis risiko. Kepala BPBD perlu memastikan bahwa program kerja disusun berdasarkan pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas wilayah. Perencanaan yang berbasis risiko akan membantu pemerintah menentukan prioritas program dan penggunaan sumber daya secara lebih tepat.

Kedua, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personel. Pengembangan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, simulasi, dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, organisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan pimpinan, tetapi juga memiliki personel yang siap menjalankan tugas secara mandiri dan terkoordinasi.

Ketiga, memperkuat sistem koordinasi dan komando. BPBD perlu memastikan adanya mekanisme komunikasi dan pembagian tugas yang jelas dengan seluruh unsur terkait. Kejelasan koordinasi menjadi penting terutama ketika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan pengerahan sumber daya dalam waktu singkat.

Keempat, mengembangkan sistem informasi kebencanaan. Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi ancaman, menyampaikan informasi peringatan dini, memetakan lokasi terdampak, dan mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang akurat akan meningkatkan kualitas respons organisasi.

Kelima, memperluas partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat siaga bencana, pelaksanaan simulasi evakuasi, serta pendidikan kebencanaan di tingkat desa dan komunitas. Langkah tersebut penting karena masyarakat merupakan unsur pertama yang berhadapan langsung dengan ancaman bencana di lingkungan tempat tinggalnya.

Keenam, memperkuat evaluasi dan akuntabilitas. Setiap kegiatan penanggulangan bencana perlu dievaluasi untuk mengetahui capaian, hambatan, dan kebutuhan perbaikan. Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pemimpin dalam mengambil kebijakan dan menyusun program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, kepemimpinan Kepala BPBD diharapkan mampu berkembang dari pola kerja yang semata-mata administratif menuju kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengurangan risiko. Keberhasilan kepemimpinan pada akhirnya harus tercermin dalam meningkatnya kesiapsiagaan organisasi, membaiknya koordinasi, serta semakin kuatnya perlindungan terhadap masyarakat.

SIMPULAN

Gaya kepemimpinan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi. Kompleksitas ancaman bencana menuntut pemimpin tidak hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga kecakapan dalam mengambil keputusan, mengelola sumber daya, membangun koordinasi, serta menggerakkan seluruh unsur organisasi dan masyarakat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat tiga pendekatan kepemimpinan yang relevan untuk diterapkan. Kepemimpinan transformasional dibutuhkan untuk membangun visi, meningkatkan motivasi, dan mendorong inovasi organisasi. Kepemimpinan situasional diperlukan agar pemimpin mampu menyesuaikan pola pengarahan dengan kondisi dan tingkat kedaruratan. Sementara itu, kepemimpinan partisipatif diperlukan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Efektivitas ketiga pendekatan tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan kebijakan dan anggaran, koordinasi antarorganisasi, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan BPBD Kabupaten Sigi perlu diarahkan pada pembentukan organisasi yang profesional, adaptif, responsif, dan kolaboratif. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif dalam penanggulangan bencana bukan hanya diukur dari kemampuan pemimpin menangani keadaan darurat, tetapi juga dari kemampuannya membangun kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi dan memastikan proses pemulihan berlangsung secara berkelanjutan. Artikel ini masih memerlukan penguatan melalui data lapangan, wawancara, dan dokumen kinerja BPBD Kabupaten Sigi agar dapat memberikan gambaran empiris mengenai gaya kepemimpinan yang benar-benar diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (2013). Management of organizational behavior: Leading human resources (10th ed.). Pearson.

Northouse, P. G. (2021). Leadership: Theory and practice (9th ed.). SAGE Publications.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BNPB.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. BNPB.

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

TENTANG PENULIS